

## ABSTRAK

Skripsi dengan judul “Implementasi Penegakan Hukum Terhadap Perjudian *Online* Berbasis Website ditinjau dari Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Studi Kasus di Kepolisian Daerah Jawa Timur)” ini ditulis oleh Patrisya Bela Oktaviani, NIM. 126103201041, Program Studi Hukum Tata Negara, Universitas Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung 2024, dibimbing oleh Yusron Munawir, S.H., M.H.

### **Kata Kunci : Penegakan Hukum, Perjudian, Online, Website**

Penelitian ini dilatarbelakangi banyaknya dari masyarakat yang melakukan perjudian online padahal aktivitas tersebut telah dilarang oleh hukum di Indonesia. Maka dari itu segala aktivitas masyarakat harus diatur berdasarkan hukum yang berlaku, begitu juga dengan tindak pidana perjudian yang dalam penerapannya harus berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku. Zaman sekarang permainan judi berupa slot, domino, qiu-qiu yang dapat dimainkan melalui smartphone. Khususnya dalam hal tindak pidana perjudian secara online diatur dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 dengan ancaman pidana diatur dalam pasal 45 ayat (2). Namun dalam realita kenyataan di lapangan, penegakan hukum terhadap perjudian belum terlaksana dengan sangat baik. Masih banyak para penjudi online yang masih berkeliaran di masyarakat, karena masih banyak website perjudian yang dapat diakses oleh masyarakat. Realitanya bahwa masyarakat belum terlalu peduli terhadap kejahatan perjudian yang terjadi di sekitarnya. Mayoritas masyarakat memilih untuk bungkam dan tidak ada upaya-upaya yang seharusnya dilakukan untuk menangani supaya perjudian tersebut dapat dihilangkan dan para pejudi bisa mendapatkan sanksi menurut hukum yang berlaku.

Rumusan masalah yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut, 1) Bagaimana implementasi penegakan hukum terhadap tindak pidana perjudian online berbasis website di Jawa Timur ditinjau dari hukum positif? 2) Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap penegakan hukum tindak pidana perjudian online berbasis website?

Metode penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum empiris yakni menggunakan jenis penelitian lapangan (*field research*). dengan menggunakan studi deskriptif gambaran atau lukisan secara sistematis, faktual, akurat, mengenai fakta-fakta, sifat serta hubungan antara fenomena yang diselidiki. Pendekatan Penelitian yang digunakan ialah pendekatan peraturan perundang-undangan (*statute approach*) merujuk kepada undang-undang yang tertulis yang menjadi fokus suatu penelitian dan pendekatan kasus (*case approach*) merujuk kepada kasus-kasus yang telah terjadi dalam suatu lingkup masyarakat. Dengan mencari dan menyusun data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan dan sumber-sumber lainnya.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa, 1) kepolisian dari Subdit V Siber Ditreskrimsus Polda Jawa Timur ini sudah memaksimalkan dalam proses penegakan hukum dari perjudian online berbasis website di Jawa Timur. Akan tetapi, dalam penegakan hukumnya terdapat beberapa kendala yaitu; a) website perjudian online ini sudah diupayakan pemblokiran namun masih ada beberapa website yang belum bisa diblokir oleh Subdit V Siber Ditreskrimsus Polda Jawa Timur beserta Kominfo namun website yang telah terblokir masih dapat dibuka dengan jaringan luar negeri yakni VPN (*Virtual Private Network*). b) Data *Provilling* yang digunakan memiliki masa aktif yang perpanjangannya memerlukan waktu berkisar 6 bulan dengan bersurat terlebih dahulu kepada Bareskrim Mabes Polri untuk memperpanjang data tersebut. c) kurangnya kepatuhan masyarakat menjadikan sulitnya aparat penegak hukum untuk dapat memberantas perjudian online ini untuk seluruhnya. 2) Adapun menurut hukum islam bahwa perjudian memang dilarang oleh ajaran islam, namun memang masih banyak orang-orang yang belum bisa mentaati larangan tersebut. Upaya dari Aparat Kepolisian ini dalam menegakan hukum untuk perjudian memang sudah sesuai dengan apa yang menjadi tujuan dari hukum islam yang melarang seseorang untuk melakukan perjudian berdasarkan bunyi dalil yakni; a) QS. Al-Baqarah ayat 219. b) QS. Al-Maidah ayat 90. c) QS. Al-Maidah ayat 91. d) Hadist dari Abu Hurairah.

## ABSTRACT

The thesis entitled " Implementation of Law Enforcement Against Website-Based Online Gambling in terms of Law Number 19 of 2016 concerning Information and Electronic Transactions (Case Study in the East Java Regional Police)" was written by Patrisya Bela Oktaviani, NIM. 126103201041, Constitutional Law Study Program, Sayyid Ali Rahmatullah University Tulungagung 2024, supervised by Yusron Munawir, S.H., M.H.

**Keywords: Law Enforcement, Gambling, Online, Website**

This research is motivated by the large number of people who gamble online even though this activity is prohibited by law in Indonesia. Therefore, all community activities must be regulated based on applicable law, as well as the criminal act of gambling, which in its implementation must be based on applicable legal provisions. Nowadays gambling games include slots, dominoes, qiu-qiu which can be played via smartphone. In particular, criminal acts of online gambling are regulated in the Information and Electronic Transactions Law, Article 27 paragraph (2) of Law Number 19 of 2016 with criminal threats regulated in Article 45 paragraph (2). However, in reality on the ground, law enforcement against gambling has not been implemented very well. There are still many online gamblers roaming around in society, because there are still many gambling websites that can be accessed by the public. The reality is that people don't really care about gambling crimes that occur around them. The majority of people choose to remain silent and no efforts should be made to deal with it so that gambling can be eliminated and gamblers can receive sanctions according to applicable law.

The problem formulation used in this research is as follows, 1) How is the implementation of law enforcement against criminal acts of website-based online gambling in East Java in terms of positive law? 2) How does Islamic law review the law enforcement of website-based online gambling crimes?

This research method uses a type of empirical legal research, namely field research. by using descriptive studies of images or paintings systematically, factually, accurately, regarding the facts, nature and relationships between the phenomena being investigated. The research approach used is the statutory approach (statute approach) referring to written laws which are the focus of a research and the case approach (case approach) refers to cases that have occurred within a society. By searching and compiling data obtained from interviews, field notes and other sources.

The results of the research show that, 1) the police from Subdit V Cyber Ditreskrimsus Polda East Java have maximized the law enforcement process for website-based online gambling in East Java. However, in law enforcement there are several obstacles, namely; a) Efforts have been made to block this online gambling website, but there are still several websites that have not been able to be blocked by Sub-Directorate V Cyber, Ditreskrimsus Polda East Java and Kominfo, but websites that have been blocked can still be opened using overseas networks, namely VPN (Virtual Private Network). b) The Proving Data used has an active period whose

extension takes around 6 months by writing first to Bareskrim Polri Headquarters to extend the data. c) the lack of public compliance makes it difficult for law enforcement officials to eradicate online gambling completely. 2) According to Islamic law, gambling is prohibited by Islamic teachings, but there are still many people who cannot comply with this prohibition. The efforts of the Police to enforce the law on gambling are indeed in accordance with the objectives of Islamic law which prohibits someone from gambling based on the proposition, namely; a) QS. Al-Baqarah verse 219. b) QS. Al-Maidah verse 90. c) QS. Al-Maidah verse 91. d) Hadith from Abu Hurairah.

## الملخص

تنفيذ القانون ضد المقامرة عبر الإنترنت بموجب القانون رقم ١٩ لسنة ٢٠١٦ بشأن المعلومات والمعاملات الإلكترونية (دراسة حالة في شرطة جاوة الشرقية الإقليمية)" كتبه باتريسيا بيلا أوكتايفاني، رقم دفتر قيد ١٤٠١٠٢٣٠١٦٢١. برنامج دراسة القانون الدستوري، قسم الشريعة، كلية الشريعة والعلوم القانونية، جامعة السيد علي رحمة الله الإسلامية الحكومية تولونج أجونج. ٤٢٠٢ ، تحت المشريف يسرا منور، الماجستير.

### الكلمات الرئيسية: إنفاذ القانون، المقامرة، عبر الإنترنت، الموقع الإلكتروني

خلفية البحث عن هذا البحث العلمي هي العدد الكبير من الأشخاص الذين يقامرون عبر الإنترنت على الرغم من أن هذا النشاط محظور بموجب القانون في إندونيسيا. لذلك، يجب تنظيم جميع أنشطة المجتمع بناءً على القانون المعمول به، بالإضافة إلى فعل المقامرة الإجرامي، والذي يجب أن يستند في تنفيذه إلى الأحكام القانونية المعمول بها. تشمل ألعاب المقامرة في الوقت الحاضر ماكينات القمار والدومينو وقبو-قيو التي يمكن لعبها عبر الهاتف الذكي. على وجه الخصوص، يتم تنظيم الأفعال الإجرامية للمقامرة عبر الإنترنت في قانون المعلومات والمعاملات الإلكترونية، المادة ٧٢ الفقرة (٢) من القانون رقم ٩١ لعام ٦١٠٢ مع التهديدات الجنائية التي تنظمها المادة ٥٤ الفقرة (٢). ومع ذلك، في الواقع، لم يتم تنفيذ تطبيق القانون ضد المقامرة بشكل جيد. لا يزال هناك العديد من المقامرين عبر الإنترنت يتجولون في المجتمع، لأنه لا يزال هناك العديد من مواقع المقامرة التي يمكن للجمهور الوصول إليها. الحقيقة هي أن الناس لا يهتمون حقًا بجرائم المقامرة التي تحدث من حولهم. يختار غالبية الأشخاص التزام الصمت ولا ينبغي بذل أي جهد للتعامل مع الأمر حتى يمكن القضاء على المقامرة ويمكن للمقامرين الحصول على عقوبات وفقًا للقانون المعمول به.

ثم مسائل هذا البحث العلمي هي: (١) كيف يتم تنفيذ القانون ضد جرائم المقامرة عبر الإنترنت على شبكة الإنترنت في جاوة الشرقية من حيث القانون الإيجابي؟ (٢) كيف تقوم الشريعة الإسلامية بمراجعة تطبيق القانون فيما يتعلق بجرائم المقامرة عبر الإنترنت؟. استخدمت الباحثة مدخل البحث الكيفي ونوعه البحث القانوني التجريبي، وهو البحث الميداني. وذلك باستخدام الدراسات الوصفية للصور أو اللوحات بشكل منهجي وواقعي ودقيق فيما يتعلق بالحقائق والطبيعة والعلاقات بين الظواهر التي يتم التحقيق فيها. منهج البحث المستخدم هو النهج القانوني (النهج القانوني) الذي يشير إلى القوانين المكتوبة التي هي محور البحث ويشير نهج الحالة (نهج الحالة) إلى الحالات التي حدثت داخل المجتمع. من خلال البحث وتجميع البيانات التي تم الحصول عليها من المقابلات والملاحظات الميدانية وغيرها من المصادر.

أما نتائج البحث فهي: (١) الشرطة من المديرية الفرعية ه سايبير، ومديرية التحقيقات الجنائية الخاصة التابعة لشرطة جاوة الشرقية الإقليمية، قامت بتعظيم عملية إنفاذ القانون فيما يتعلق بالمقامرة عبر الإنترنت على مواقع الويب في جاوة الشرقية. ومع ذلك، في تطبيق القانون هناك عدة عوائق، وهي؛ أ) جرت محاولات لحظر موقع المقامرة عبر الإنترنت هذا، ولكن لا يزال هناك العديد من مواقع الويب التي لم يتم حظرها من قبل المديرية الفرعية ه سايبير، ومديرية التحقيقات الجنائية الخاصة، وشرطة جاوة الشرقية الإقليمية ووزارة الاتصالات والمعلومات، ولكن لا يزال من الممكن فتح مواقع الويب التي تم حظرها باستخدام شبكة أجنبية، وهي (الشبكة الخاصة الافتراضية). ب) تتمتع عملية تقديم البيانات المستخدمة بفترة نشطة يستغرق تمديدها حوالي ٦ أشهر عن طريق الكتابة أولاً إلى وكالة التحقيقات الجنائية التابعة لمقر الشرطة الوطنية لتمديد البيانات. ج) عدم الالتزام العام يجعل من الصعب على مسؤولي إنفاذ القانون القضاء على المقامرة عبر الإنترنت بشكل كامل. ٢) وفقاً للشريعة الإسلامية، فإن القمار محرم بموجب التعاليم الإسلامية، ولكن لا يزال هناك الكثير من الناس الذين لا يستطيعون الالتزام بهذا الحظر. إن الجهود

التي تبذلها الشرطة لتطبيق قانون القمار تتوافق بالفعل مع أهداف الشريعة الإسلامية التي تحرم أي شخص من القمار بناءً على هذا الاقتراح، وهي؛ أ) سورة البقرة الآية ٩١٢ . ب) سورة المائدة الآية ١٠٩ . ج) المائدة الآية ١٩ . د) حديث عن أبي هريرة